

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR
GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA
GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR
ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

M. AMAL AKHIYAR
NPM : 1802110117



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. AMAL AKHIYAR
NPM : 1802110117

Dengan judul:

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR
GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI
DANA GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR
ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

I. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II

Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.
NIK. 19871208 201306 2 001

Mengetahui,
Dekan



Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. AMAL AKHIYAR
NPM : 1802110117

Dengan judul:

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR
GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI
DANA GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR
ACEH BESAR**

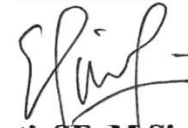
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 28 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian


Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris



Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota



Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.
NIK. 19871208 201306 2 001

Anggota



Emmi Suryani Nst, SE, M.Si.
NIK. 19800301 200610 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 28 Februari 2022

Yang Menyatakan



M. AMAL AKHIYAR

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Amal Akhiyar
NPM : 1802110117
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR ACEH BESAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Maret 2022

Banda Aceh, 01 Maret 2022

Yang Menyatakan



M. AMAL AKHIYAR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA Selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 8
2.1. Landasan Teoritis	8
2.1.1 Kinerja Pengelolaan Dana Desa.....	8
2.1.2 Partisipasi Masyarakat	11
2.1.3 Kapasitas Aparatur Gampong	14
2.1.4 Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong	17
2.2. Penelitian Sebelumnya	22
2.3. Kerangka Penelitian	26
2.4. Hipotesis	29
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
3.1. Desain Penelitian.....	31
3.1.1. Tujuan Penelitian	31
3.1.2. Jenis Penelitian.....	31
3.1.3. Horison Waktu	32
3.1.4. Unit Analisis.....	32
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4. Definisi Operasionalisasi Variabel.....	35
3.5. Teknik Analisis Data.....	37
3.6. Pengujian Data	37
3.6.1 Pengujian Validitas	38
3.6.2 Pengujian Reliabilitas.....	38
3.7. Pengujian Hipotesis.....	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 41
4.1. Karakteristik Responden	41
4.2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
4.2.1. Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.....	43

4.2.1. Variabel Partisipasi Masyarakat.....	44
4.2.1. Variabel Kapasitas Aparatur Gampong	46
4.2.1. Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong..	47
4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	48
4.3.1. Hasil Uji Validitas.....	48
4.3.1. Hasil Uji Reliabilitas	50
4.4. Hasil Penelitian	51
4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.4.2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2).....	53
4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis	54
4.4.3.1. Pengujian Secara Bersama-Sama.....	54
4.4.3.2. Pengujian Secara Parsial	54
4.5. Pembahasan.....	55
4.5.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.....	55
4.5.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.....	56
4.5.3. Pengaruh Kapasitas Aparatur Gampong Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.....	57
4.5.4. Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1 Nama Gampong Di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar	33
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 3.3 Skala Likert	37
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	41
Tabel 4.2 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong	43
Tabel 4.3 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat.....	45
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kapasitas Aparatur Gampong	46
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong.....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	49
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	50
Tabel 4.8 Pengaruh variabel bebas terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong	51
Tabel 4.9 Model Summury	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	29

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR
GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA
GAMPONG DI KECAMATAN SUKAMAKMUR
ACEH BESAR**

**M. AMAL AKHIYAR
NPM : 1802110117**

Pembimbing I : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuisisioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji bersama-sama dan uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara bersama-sama dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Objek dalam penelitian ini pada Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 70 apartur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara uji simultan antara variabel Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Kemudian secara parsial yaitu Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Kapasitas Aparatur Gampong berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong, Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

THE EFFECT OF COMMUNITY PARTICIPATION, CAPACITY OF GAMPONG APPARATUS AND SUPERVISION OF THE GAMPONG CONSULTANCY BOARD ON THE PERFORMANCE OF GAMPONG FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN SUKAMAKMUR DISTRICT BIG ACEH

M. AMAL AKHIYAR
NPM : 1802110117

Advisor I : Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA

Advisor II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of Community Participation, Gampong Apparatus Capacity and Gampong Consultative Body Supervision on Gampong Fund Allocation Management Performance in Sukamakmur District, Aceh Besar. Research data were collected through a list of questions/questionnaires and a study of documentation. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis, joint test and partial test is intended to determine jointly and partially the effect of the independent variable on the dependent variable at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The object of this research is Sukamakmur District, Aceh Besar. The sample size of this study was 70 apartments. The results showed that the simultaneous test of the variables of Community Participation, Gampong Apparatus Capacity and Gampong Consultative Body Supervision simultaneously affected the Performance of Gampong Fund Allocation Management in Sukamakmur District, Aceh Besar. Then partially, that is, Community Participation has an effect on the Performance of Village Fund Allocation Management in Sukamakmur District, Aceh Besar. The capacity of the Gampong Apparatus affects the Performance of Village Fund Allocation Management in Sukamakmur District, Aceh Besar. The supervision of the Gampong Consultative Body has an effect on the Performance of Village Fund Allocation Management in Sukamakmur District, Aceh Besar.

Keywords: Community Participation, Gampong Apparatus Capacity, Gampong Consultative Body Supervision and Gampong Fund Allocation Management Performance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari penggunaan anggaran. Para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja dari organisasi sektor publik baik pusat atau daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas yang mana memperhatikan beberapa hal, yaitu: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggung jawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang pertama dimulai dari atasan langsung yang melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dari setiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawas *intern* Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengawas *ekstern* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pengawasan yang ketiga dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga komponen pengawasan tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk mencapai *good governance* khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dikatakan berhasil, jika realisasi anggaran tercapai dengan maksimal dan keseluruhan proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat tercapai dari semakin maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, ditinjau dari baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, persentase realisasi anggaran yang maksimal dan laporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel. Disamping itu di akhir anggaran, tentunya dilakukan evaluasi dan perbaikan atas kelayakan anggaran tahunan yang telah dilaksanakan. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik.

Dari hasil survey awal dengan beberapa aparatur Gampong di kecamatan Sukamakmur Aceh Besar bahwa permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar disebabkan beberapa faktor seperti masih minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu juga ditemukan bahwa *monitoring* dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa masih belum optimal. Sehingga masih perlu adanya regulasi dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat khususnya terkait pengawasan pengelolaan dana desa serta program pelatihan untuk perangkat desa.

Faktor tingkat ketidakefektifan peningkatan alokasi dana desa tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya pengawasan dari pemerintahan daerah.

Pada pelaksanaan Dana Desa, anggaran alokasi jatuh kepada pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pihak desa. namun karena ketidakpahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kenaikan jumlah pengalokasian dana desa mewajibkan setiap desa dapat mengelolanya secara mandiri, efektif dan efisien. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi terhadap pengelolaan yang harus dilakukan berdasar prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengaruh Partisipasi masyarakat, Kapasitas aparatur gampong Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

3. Apakah kapasitas aparatur gampong berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar
4. Apakah pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar
3. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas aparatur gampong secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambahkan wawasan penulis dalam bidang akuntansi terutama dalam hal partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dan kinerja pengelolaan alokasi dana gampong
- b. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis yang akan di masa yang akan datang yaitu mengenai partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dan kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.

2. Manfaat Praktis

Sebagai baha masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi Aceh khususnya di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan judul pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Istilah kinerja (*performance*) identik dengan prestasi kerja, yang artinya sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dengan jelas *output* yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Kinerja pegawai akan menunjuk pada efektivitas kerja pegawai, dimana hal ini akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan (Syahrani, 2016:3).

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Moeheriono, 2018:23)

Kinerja adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi yang relevan dengan tugas-tugas yang realitis dan gambaran perilaku difokuskan kepada konteks pekerjaan, yaitu perilaku diwujudkan untuk memperjelas deskripsi-deskripsi kerja menentukan kinerja yang memenuhi kebutuhan organisasi (Harris, 2018:23). Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan sesuatu. Kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah. (Mangkunegara, 2018:16). Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. (Jumali, 2017:86)

Berdasarkan beberapa kajian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Kinerja individu pegawai adalah unjuk kerja individu dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, tugas tersebut biasanya berdasarkan keberhasilan yang sudah ditetapkan (Mulyasa, 2016:24). Kinerja individu pegawai adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi. Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi bergantung kepada bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat memonitoring dan membantu proses kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada lembaga tersebut (Suryawan, 2018:6).

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja-kemampuan mereka, motivasi dan dukungan yang diterimanya, keberadaan pekerjaan

yang mereka lakukan dan hubungan mereka dengan organisasi. Untuk mengukur keberhasilan suatu sistem sulit dilakukan.

Kinerja individu pegawai merupakan fondasi dari kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami beberapa perilaku individu dalam organisasi sebelum menilai Kinerja individu seorang pegawai. Kinerja individu pegawai seringkali dikaitkan dengan karakteristik jenis pekerjaan, jenis industri, serta kemampuan teknologi dan sistem yang dipakai Suhud (2018:30). Dalam penelitian Goodhue (2018:99) pencapaian kinerja individu pegawai dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Pengukuran Kinerja individu pegawai ini melihat dampak sistem informasi baru terhadap efektifitas penyelesaian tugas, membantu meningkatkan kinerja, dan menjadikan pemakai lebih produktif dan kreatif.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja mengacu pada prestasi kerja individu yang diatur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Kinerja individu pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Indikator untuk mengukur Kinerja individu pegawai menurut Jumali (2017:86) adalah sebagai berikut;

1. Pemanfaatan sistem komputer
2. Layanan komputer
3. Produktif dan kreatif
4. Efektivitas dan produktivitas
5. Sarat layanan
6. Lebih produktif

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

Menurut Supomo dan Indriantoro (2017:17) menyatakan partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Handayani (2017:40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model

baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Partisipasi mengandung makna adanya keterlibatan para karyawan dalam aspek-aspek mental dan emosional yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Bentuk partisipasi ini sebenarnya merupakan proses komunikasi atau teknik mendapatkan dan memanfaatkan umpan balik dari karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam hal ini pihak karyawan tidak memiliki otoritas mengambil keputusan karena yang berwewenang untuk suatu keputusan hanyalah prerogatif pihak manajemen. Karyawan hanyalah ikut dalam proses pengenalan atau identifikasi masalah, mengadakan monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya, melaporkan kegiatannya, dan menyarankan atau mengusulkan saran-saran pemecahan masalah. Menurut Slamet (2018:6), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Yuwono (2017:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Marschall (2016) dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu:

1. Adanya kontribusi
2. Adanya pengorganisasian
3. Peran masyarakat dan aksi masyarakat,

4. Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

2.1.3 Kapasitas Aparatur Gampong

Kapasitas aparatur penting dalam usaha organisasi mencapai keberhasilan yang dapat menunjang organisasi melalui karya, bakat, kreatifitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Istilah kapasitas memiliki beragam pengertian tergantung siapa yang mengartikannya dan dalam konteks apa istilah tersebut akan digunakan. Menurut Soeprapto (2017:10) mengatakan bahwa: “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya, dalam rumusan lain *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Soeprapto (2017:12) menyatakan bahwa “Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan”. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Soeprapto (2017:9) mendefinisikan “Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang

dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

Manajemen merupakan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen bisa sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis juga sebagai suatu kreativitas pribadi yang disertai suatu keterampilan. Garry (2018:5), menjelaskan bahwa kapasitas aparaturnya adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian.

Dalam lingkungan bisnis global yang dinamis saat ini, perusahaan dituntut untuk dapat menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang. Seperti yang dikemukakan Suwatno (2018:48), menjelaskan bahwa ada lima nilai penting untuk mendukung organisasi dalam mengambil keputusan, yaitu : Teknologi Informasi, Kinerja Prima, Kesempatan yang lebih baik, Kepercayaan dan Tanpa batasan Jadi pada pelaksanaannya, organisasi bisnis membutuhkan teknologi informasi untuk memperoleh informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Hasibuan (2014:10) menjelaskan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting bagi organisasi, dimana pada hakekatnya berfungsi sebagai faktor penggerak bagi setiap kegiatan di dalam perusahaan. Suatu organisasi dalam melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya manajemen yang baik terutama sumber daya manusia, karena sumber daya

manusia merupakan modal utama dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan serta menggerakkan faktor-faktor yang ada dalam suatu organisasi. Berdasarkan hakikat kesetaraan dan keadilan gender terdapat kesamaan kondisi bagi pria maupun wanita untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam segala kegiatan pembangunan (Wibowo, 2016: 10).

Sutrisno (2018:6) menjelaskan bahwa Manajemen Sumber Daya manusia, merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa Sumber Daya Manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Sunyoto (2018:1) menjelaskan bahwa “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kapasitas pemerintah terdapat tiga tingkat yakni pada tingkat sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan pengaturan, kebijakan-kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektivitas kebijakan tertentu. Tingkat intitusional atau keseluruhan satuan, seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, penguatan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. Kemudian tingkat individu, seperti pengembangan keterampilan individu

dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, kompetensi dari pegawai dan etika bekerja.

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting bagi organisasi, dimana pada hakekatnya berfungsi sebagai faktor penggerak bagi setiap kegiatan di dalam perusahaan (Wibowo, 2018:87). Indikator yang digunakan untuk mengukur kapabilitas aparatur, yaitu sebagai berikut (Wibowo, 2018:87):

1. Motiv adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motiv mendorong, mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Seperti halnya kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri kompetensi seorang pilot tempur.
3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

2.1.4 Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan berasal dari akar kata “was”, mendapat awal”an” dan akhiran “an” artinya penilikan dan penjagaan. Namun untuk penjelasan berikut pengawasan dikaitkan dengan fungsi manajemen pemerintah daerah. Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan budaya organisasi yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut Syafii (2016:109) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart (ukuran). Sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, agar dapat diselesaikan secara sempurna sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Menurut Murhaini (2016:3) pengawasan adalah tindakan aparat pemerintah agar pelaksanaan kegiatan dan tugas yang ditetapkan dapat tercapai serta menghindari dari terjadinya penyimpangan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dikerjakan, dilaksanakan, atau diselenggarakan kemudian menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen, dimana fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan proses manajemen. Dengan tindakan pengawasan akan dapat diketahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan para pegawai sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila ternyata ada penyimpangan dari rencana, kebijaksanaan maupun pemerintah yang telah

dikeluarkan, dapat segera diketahui dan selanjutnya diadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

Agar perencanaan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tindakan pengawasan perlu dilakukan. Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pengertian dari pengawasan keuangan daerah yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6).

Menurut Fahmi (2018:86) kualitas pengawasan juga sangat ditentukan oleh tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengawasan pendahuluan sebelum kegiatan dilaksanakan (*Feed Forward*).
2. Pengawasan kegiatan sedang dilaksanakan (*Concurrent*).
3. Pengawasan unpan balik (*feed back*)`

Sedangkan menurut Bharoto (2017:7) terdapat beberapa jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya tanpa melalui perantara atau tanpa melalui pendelegasian wewenang. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh pimpinan disebut *Built In Control*.
2. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui pendelegasian wewenang. Pengawasan tidak langsung dilakukan apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka atau statistik yang berisi gambaran atau hasil kemajuan yang telah tercapai

sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan formal ialah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan yang mencakup formalitas atas dasar ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan formal merupakan pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasannya daripada pimpinan organisasinya.

4. Pengawasan Informal

Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak disertai melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan Informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan tidak resmi (pribadi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan

5. Pengawasan Teknik (Teknik Control)

Pengawasan teknik ialah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik misalnya pemeriksaan terhadap pembangunan gedung dan pemeriksaan kesehatan rakyat di desa dan sebagainya.

Menurut Rachman (2016: 23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Menurut Rachman (2016:23) Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tujuan penelitian terdahulu ini adalah karena peneliti ingin membandingkan mendapatkan bukti empiris yang mendukung tujuan penelitian ini. Penelitian dari Ningsih (2020) dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi Pada Kecamatan Geumpang, Mane, Dan Tangse Kabupaten Pidie). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, dan pengawasan BPG berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong. Hal ini menunjukkan bawa semakin baik partisipasi dan kapasitas aparatur gampong, semakin optimal pengelolaan dana gampong dan semakin efektif pengawasan BPG maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan gampong.

Tumbel (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah stafstaf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala jaga dan diikuti beberapa masyarakat, manun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.

Firdaus (2019) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil

analisis diperoleh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat meningkat maka pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sidoharjo semakin baik.

Perdana (2019) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten Bantul.

Aulia (2018) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten 50 Kota. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi Pada Kecamatan Geumpang, Mane, Dan Tangse Kabupaten Pidie). (Ningsih, 2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, dan pengawasan BPG berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.	Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong Kapasitas aparatur gampong Partisipasi masyarakat Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Teknik pengumpulan data	Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data
2	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Tumbel, 2020)	Metode kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah stafstaf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala jaga dan diikuti beberapa masyarakat, manun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.	Kapasitas aparatur gampong	Teknik analisis data Lokasi penelitian Analisis data

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Firdaus, 2019)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis diperoleh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat meningkat maka pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sidoharjo semakin baik.	Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong Partisipasi masyarakat Teknik pengumpulan data	Variabel transparansi Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data
4	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. (Perdana, 2019)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten Bantul.	Pengelolaan dana desa Partisipasi masyarakat Teknik pengumpulan data	Variabel pemanfaatan teknologi, Komitmen organisasi, Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota (Aulia, 2018)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten 50 Kota	Akuntabilitas pengelolaan dana desa Partisipasi masyarakat Teknik pengumpulan data	Variabel pemanfaatan teknologi, komitmen organisasi dan kompetensi aparatur pengelolaan dana desa Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Masyarakat Gampong merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional. Guna menunjang kesejahteraan masyarakat gampong, gampong mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk pendapatan gampong yang berbentuk Anggaran Dana Gampong. Kebijakan ADG memberikan kewenangan kepada gampong untuk mengelola keuangannya sendiri.

Pengelolaan ADG dilaksanakan secara partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif didalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Singkatnya, partisipasi masyarakat menjadi titik strategis dalam pengelolaan ADG. Partisipasi

masyarakat pada dasarnya berperan penting didalam menciptakan keadaan yang lebih adil, partisipatif, dan akuntabel juga merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pada level pemerintahan gampong. Suwandi (2015), menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah gampong cukup tinggi, namun dalam pengelolaannya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum terjadi secara langsung.

2.3.2 Hubungan Kapasitas Aparatur Gampong dengan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Aparatur merupakan salah satu faktor terpenting sebagai penunjang pemerintah. Tugas utama dari aparatur adalah sebagai pelayanan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan. Tanpa adanya aparatur, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan. Mengingat begitu pentingnya peran aparatur maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparatur itu sendiri baik melalui pengembangan aparatur dengan pelatihan maupun dengan berbagai hal lainnya.

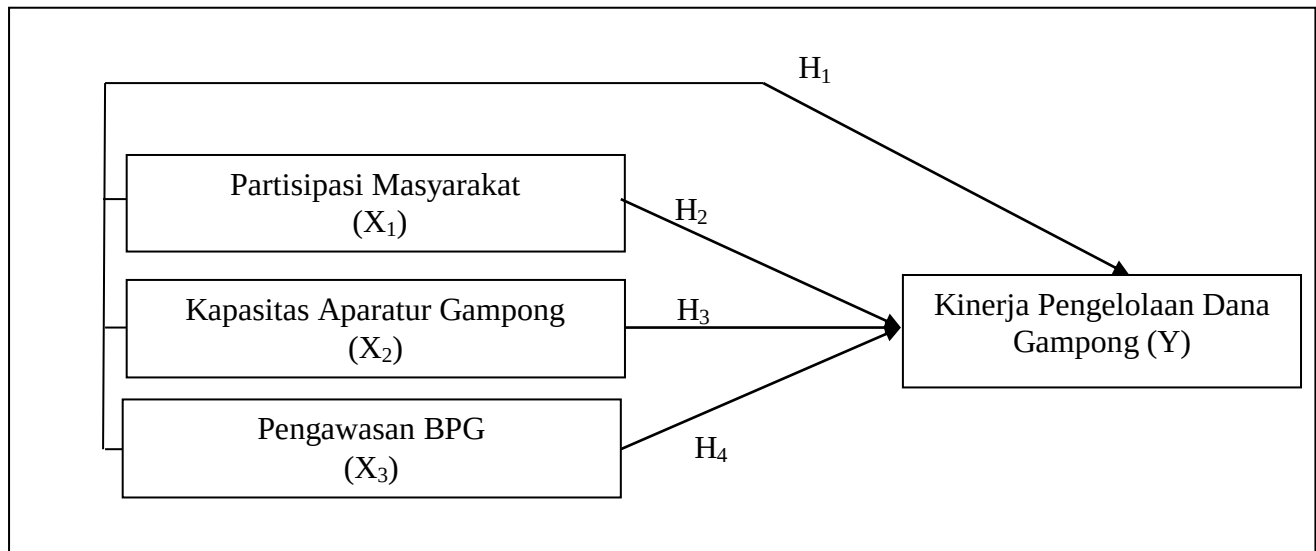
Terlepas dari kenyataan masih banyaknya aparatur gampong yang kompetensinya masih kurang memadai akibat prasyarat pendidikan dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para aparatur gampong, maka dalam rangka implementasi undang-undang gampong yang memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintahan gampong untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur gampong

sebagai sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah gampong dengan baik.

2.3.3 Hubungan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dengan Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong

Peran BPG dalam pengelolaan dana gampong antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana gampong sebagai wujud penampungan aspirasi masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana gampong dengan pertimbangan kepala gampong. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelola dana gampong dilakukan BPG secara langsung dan berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama kepala dan perangkat gampong, serta kelompok masyarakat dari awal sampai selesai. BPG juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPG yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja gampong kepada kepala gampong selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong. BPG wajib menyampaikan laporan karena BPG juga menggunakan dana dari APBG. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas BPG juga membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan administrasi keuangan BPG disampaikan secara tertulis.

Berdasarkan hubungan antara variabel yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hubungan antara variabel penelitian dapat digambarkan pada Gambar 2.1;



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Pemikiran Peneliti 2021

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- H₁: Partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.
- H₂: Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar
- H₃: Kapasitas aparatur gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

H₄: Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu;

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode analisis korelasional, yang tujuannya untuk mencari hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dan seberapa kuat hubungan tersebut. Penelitian ini juga merupakan penelitian kausal-komparatif. Kausal komparatif adalah penelitian yang berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.

3.1.4. Horison Waktu

Penelitian deskriptif berdasarkan rentang waktu (*on shoot study*). *On shoot study* merupakan penelitian yang hanya dilakukan pada satu periode terhadap berbagai sampel dalam populasi. Berdasarkan horison waktu, maka data penelitian dikumpulkan melalui satu titik waktu (*one shot study*) dengan tahun pengamatan 2018-2020.

3.1.4. Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. `

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur masing-masing di Gampong yang ada di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Metode sampel jenuh atau sensus dimana seluruh elemen populasi dijadikan sampel, sehingga penelitiannya merupakan penelitian sensus/sampling jenuh. Dimana seluruh jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 aparatur desa di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan Supranto (2017). Metode sensus dimana

seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya (*true value*), atau sering disebut parameter (Supranto, 2017). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 aparatur desa di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar yang terdiri Kaur Pembangunan dan Sekretaris Desa. Jumlah aparatur masing-masing Gampong yang ada Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nama Gampong Di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

No	Gampong	Bendahara Gampong	Sekretaris Gampong	Jumlah Aparatur
1	Aneuk Batee	1	1	2
2	Aneuk Galong Baro	1	1	2
3	Aneuk Galong Titi	1	1	2
4	Blang Cut	1	1	2
5	Bukloh	1	1	2
6	Kling Manyang	1	1	2
7	Lambarih Jurong Raya	1	1	2
8	Lambarih Meunasah B. Mee	1	1	2
9	Lampisang	1	1	2
10	Meunasah Bakthue	1	1	2
11	Meunasah Tuha	1	1	2
12	Niron	1	1	2
13	Lam Geu Baro	1	1	2
14	Lam Geu Tuha	1	1	2
15	Lamlheu	1	1	2
16	Lampanah Ineu	1	1	2
17	Lamteh Dayah	1	1	2
18	Tampok Blang	1	1	2
19	Tampok Jirat Raya	1	1	2
20	Baet Lampuot	1	1	2
21	Baet Mesago	1	1	2
22	Baet Mesjid	1	1	2
23	Dilib Bukti	1	1	2
24	Dilib Lamteungoh	1	1	2
25	Lambaro Sibreh	1	1	2
26	Reuhat Tuha	1	1	2
27	Seumeureung	1	1	2
28	Sibreh Keumudee	1	1	2
28	Weusiteh	1	1	2
30	Kayee Adang	1	1	2

Lanjutan Tabel 3.1

No	Gampong	Bendahara Gampong	Sekretaris Gampong	Jumlah Aparatur
31	Lambirah	1	1	2
32	Lamtanjong	1	1	2
33	Luthu Dayah Krueng	1	1	2
34	Luthu Lamweu	1	1	2
35	Pantee Rawa	1	1	2
Jumlah		35	35	70

Sumber: Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar (2021).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat dan reliabel. Sumber data yang digunakan antara lain (Sugiyono, 2018:139) data primer diperoleh dari dokumentasi dan daftar pertanyaan (kuisisioner). Untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup, yaitu pertanyaan yang dirancang berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka melalui artikel majalah pemasaran maupun yang diambil dari internet untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan langsung kuisisioner kepada responden. Kuisisioner tersebut berisi pertanyaan ataupun pernyataan yang berhubungan dengan variabel-variabel partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.

3.4 Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 variabel, yaitu masing-masing variabel terikat yaitu kinerja pengelolaan alokasi dana gampong, variabel bebas yaitu partisipasi masyarakat, Kapasitas aparatur gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong. Variabel-variabel tersebut dapat dilihat melalui Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Dependen Variabel					
1	Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Y)	Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. (Jumali, 2017:86)	Pemanfaatan sistem komputer	Likert	A-A5
			Layanan komputer		
			Produktif dan kreatif		
			Efektivitas dan produktivitas		
			Sarat layanan		
			Lebih produktif		
Independen Variabel					
1	Partisipasi masyarakat (X ₁)	Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Marschall, 2016)	Adanya kontribusi	Likert	B1-B4
			Adanya pengorganisasian		
			Peran masyarakat dan aksi masyarakat,		
			Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat		

Lanjutan Tabel 3.2

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	
Independen Variabel					
2	Kapasitas aparatur gampong (X ₂)	Kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Wibowo, 2018:87)	Motiv	Likert	C1-C5
			Sifat		
			Konsep diri		
			Pengetahuan		
			Keterampilan		
3	Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X ₃)	Pengawasan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) (Rachman, 2016: 23).	Meningkatkan disiplin dan pencapaian sasaran	Likert	D1-D3
			Berkurangnya penyalahgunaan wewenang		
			Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar		

Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5

dengan kategori menurut Arikunto (2016:66) adalah seperti pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3
Skala Likert

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistic Pagcket for Social Saince*) versi 22. Adapun persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong

X₁ = Partisipasi masyarakat

X₂ = Kapasitas aparatur gampong

X₃ = Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

a = Konstanta

b = Parameter Regresi

e = *Error Term*

3.6 Pengujian Data

Uji reliabilitas dan validitas adalah uji terhadap instrumen penelitian yang akan menyajikan data kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang bersifat kualitaif sehingga

harus dapat memberikan kebenaran dan kepercayaan melalui suatu set uji kehandalan dan validitas (Sugiyono, 2018).

3.6.1 Pengujian Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi, keperluan dan tujuan tertentu. Dengan kata lain bahwa kuesioner dianggap valid jika kuesioner tersebut benar-benar dapat menyajikan suatu set data mengenai perilaku dan aktivitas responden sebagaimana yang diharapkan. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analysis corelation* yang menjelaskan korelasi (hubungan) diantara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Ukuran data dianggap valid apabila korelasi hitung lebih besar dari angka kritis nilai $-r$ (*table product moment*) (Sugiyono, 2018).

3.6.2 Pengujian Kehandalan (Reliability)

Reliabilitas instrument adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh kuesioner, meskipun digunakan secara berulang-ulang. Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variabel yang terlibat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Uji ini dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya variansi atau perbedaan yang diharapkan pada seperangkat pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap suatu objek. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60 (Malhotra, 2016).

3.7 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis merupakan pelaksanaan alternatif jawaban untuk menjawab ke empat rumusan masalah dalam penelitian ini. Rancangan tersebut dalam penelitian alternatif (H_a), yaitu,

H_{a1} = Partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

H_{a2} = Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

H_{a3} = Kapasitas aparatur gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

H_{a4} = Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara individu (parsial) :

H_{o2} : Jika $\beta_1 = 0$, maka H_o diterima (H_a ditolak), artinya partisipasi masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

H_{o2} : Jika $\beta_1 \neq 0$ maka H_a diterima (H_o ditolak), artinya partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

H_{03} : Jika $\beta_2 = 0$, maka H_0 diterima (H_a ditolak), artinya komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

H_{03} : Jika $\beta_2 \neq 0$ maka H_a diterima (H_0 ditolak), artinya komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

H_{04} : Jika $\beta_3 = 0$, maka H_0 diterima (H_a ditolak), artinya pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

H_{04} : Jika $\beta_3 \neq 0$ maka H_a diterima (H_0 ditolak), artinya pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

3.7.2 Uji Secara Simultan

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara bersama-sama

- H_{01} : Jika $\beta_i (i = 1, 2, 3) = 0$: maka H_0 diterima (H_a ditolak). Artinya bahwa, variabel *independent* partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent*.
- H_{01} : Jika $\beta_i (i = 1, 2, 3) \neq 0$, : maka H_a diterima (H_0 ditolak). Artinya bahwa, variabel *independent* partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan serta masa kerja yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	a. < 25 Tahun	2	2,9
	b. 26-31 Tahun	14	20,0
	c. 32-37 Tahun	11	15,7
	d. 38-43 Tahun	14	25,7
	e. 44-49 Tahun	18	25,7
	f. > 70 Tahun	11	15,7
Total		70	100
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	63	90,0
	b. Wanita	7	10,0
Total		70	100
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	3	4,3
	b. Menikah	67	95,7
Total		70	100
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. SMA	28	40,0
	b. Diploma	12	17,1
	c. Sarjana	29	41,4
	d. Pasca Sarjana	1	1,4
Total		70	100
5.	Pendapatan Rata-rata Perbulan		
	a. < Rp 2.700.000	14	20,0
	b. Rp 2.600.000-Rp 4.000.000	33	47,1
	c. Rp 4.100.000-Rp 5.700.000	17	24,3
	d. > Rp 5.700.000	6	8,6
Total		70	100

Sumber: Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 25 tahun yaitu sebanyak 2 responden atau 2,9%, yang berusia antara 26 sampai dengan 31 tahun yaitu sebanyak 14 responden atau 20%, yang berusia antara 32 sampai dengan 37 tahun yaitu sebanyak 11 responden atau 15,7%, yang berusia antara 38 sampai dengan 43 tahun yaitu sebanyak 14 responden atau 20%, yang berusia antara 44 sampai dengan 49 tahun sebanyak 18 responden atau 25,7% dan yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 11 responden atau 15,7%

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 63 responden atau 90% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 7 responden atau 10%. Kemudian Karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan yang belum menikah adalah sebanyak 3 responden atau 4,3% dan yang sudah menikah sebanyak 67 responden atau 95,7%

Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 28 responden atau 40%, yang berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 12 responden atau 17,1%, yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 29 responden atau 41,4% dan yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 1 responden atau 1,4%.

Mengenai tingkat pendapatan responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 14 responden atau 20% dengan pendapatan perbulan sebesar dibawah Rp 2.500.000, sebanyak 33 responden atau 47,1% dengan pendapatan perbulan sebesar Rp 2.600.000-Rp 4.000.000, sebanyak 17 responden atau 24,3% dengan pendapatan sebesar Rp

4.100.000-Rp 5.500.000 dan sebanyak 6 responden atau 8,6% dengan pendapatan di atas Rp 5.500.000.

4.2. Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini mengamati tiga variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel Partisipasi Masyarakat (X_1), variabel Kapasitas Aparatur Gampong (X_2) dan variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y).

4.2.1. Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Penjelasan responden tentang variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong pada dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Menggunakan sistem komputer pada kantor dapat meningkatkan kualitas kerja	1	1,4	8	11,4	20	28,6	30	42,9	11	15,7	3,60
2	Aparatur selalu berusaha memahami data dan informasi yang menjadi tanggung jawab aparatur	3	4,3	3	4,3	14	20,0	32	45,7	18	25,7	3,84
3	Aktivitas yang umum dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi	4	5,7	7	10,0	11	15,7	32	45,7	16	22,9	3,70
4	Aparatur yakin dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif	3	4,3	1	1,4	10	14,3	42	60,0	14	20,0	3,90

Tabel 4.2 Lanjutan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
5	Sistem komputer yang aparatur manfaatkan sangat penting dalam membatu meningkatkan kinerja aparatur	5	7,1	17	24,3	12	17,2	24	34,3	12	17,1	3,30
6	Setelah menggunakan sistem komputer aparatur merasa lebih produktif	3	4,3	1	1,4	14	20,0	38	54,3	14	20,0	3,84
Rerata												3,70

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.2 pada indikator pertama bahwa menggunakan sistem komputer pada kantor dapat meningkatkan kualitas kerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,60. Aparatur selalu berusaha memahami data dan informasi yang menjadi tanggung jawab aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,84. Aktivitas yang umum dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,70. Aparatur yakin dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,90. Sistem komputer yang aparatur manfaatkan sangat penting dalam membatu meningkatkan kinerja aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,30. Setelah menggunakan sistem komputer aparatur merasa lebih produktif diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,84. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong sebesar 3,70 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.2.2. Variabel Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai Partisipasi Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa	4	5,7	3	4,3	12	17,1	36	51,4	15	21,4	3,60
2	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi pengelolaan dana desa	7	10,0	3	4,3	12	17,1	35	50,0	13	18,6	3,84
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa	4	5,7	6	8,6	12	17,1	35	50,0	13	18,6	3,70
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur	2	2,9	4	5,7	16	22,9	34	48,6	14	20,0	3,90
Rerata												3,71

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,79. Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,63. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam

konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67. Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,77. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel Partisipasi Masyarakat Kerja sebesar 3,71 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.2.3. Variabel Kapasitas Aparatur Gampong

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel Kapasitas Aparatur Gampong dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kapasitas Aparatur Gampong

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Aparatur gampong memperoleh kehormatan sebagai aparatur yang layak diterima masyarakat	4	5,7	2	2,9	8	11,4	28	40,0	28	40,0	4,06
2	Aparatur memiliki sifat kerja yang baik dalam pengelolaan dana desa	3	4,3	5	7,1	12	17,1	34	48,6	16	22,9	3,79
3	Keberhasilan yang aparatur capai merupakan hasil dari kegigihan aparatur bekerja sebagai konsep dirinya	2	2,9	4	5,7	18	25,7	32	45,7	14	20,0	3,74
4	Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur sudah baik	2	2,9	3	4,3	20	28,6	35	50,0	10	14,3	3,69
5	Aparatur gampong memiliki keterampilan kerja yang baik	1	1,4	2	2,9	18	25,7	30	42,9	19	27,1	3,91
Rerata												3,84

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu aparatur gampong memperoleh kehormatan sebagai aparatur yang layak diterima masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,06. Aparatur memiliki sifat kerja yang baik dalam pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,79. Keberhasilan yang aparatur capai merupakan hasil dari kegigihan aparatur bekerja sebagai konsep dirinya diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,74. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur sudah baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,69. Aparatur gampong memiliki keterampilan kerja yang baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,91. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel Kapasitas Aparatur Gampong sebesar 3,84 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.2.4. Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur, prestasi dan pencapaian sasaran	4	5,7	1	1,4	89	11,4	43	61,4	17	20,0	3,89
2	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat berkurangnya penyalahgunaan wewenang	5	7,1	3	4,3	8	11,4	37	52,9	17	24,3	3,83

Tabel 4.5 Lanjutan

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
3	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat mengurangi tingkat pemborosan dan pungutan liar	3	4,3	4	5,7	9	12,9	35	50,0	19	27,1	3,90
Rerata												3,87

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan dari indikator yang pertama bahwa Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur, prestasi dan pencapaian sasaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,89. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat berkurangnya penyalahgunaan wewenang diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat mengurangi tingkat pemborosan dan pungutan liar diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,90. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong sebesar 3,87 artinya responden menyatakan kurang setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara stastitik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficien of correlation* dengan bantuan SPSS. Semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,235, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki

validitas. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=70)	Ket
1	A1	Y	0,484	0,235	Valid
2	A2		0,568	0,235	Valid
3	A3		0,599	0,235	Valid
4	A4		0,685	0,235	Valid
5	A5		0,371	0,235	Valid
6	A6		0,596	0,235	Valid
7	B1	X ₁	0,443	0,235	Valid
8	B2		0,638	0,235	Valid
9	B3		0,596	0,235	Valid
10	B4		0,392	0,235	Valid
11	C1	X ₂	0,509	0,235	Valid
12	C2		0,523	0,235	Valid
13	C3		0,592	0,235	Valid
14	C4		0,514	0,235	Valid
15	C5		0,396	0,235	Valid
16	D1	X ₃	0,466	0,235	Valid
17	D2		0,689	0,235	Valid
18	D3		0,596	0,235	Valid

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,235 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal *consistency* atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS.

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)

No	Variabel	Item Variabel	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)	6	0841	Handal
2.	Partisipasi Masyarakat (X ₁)	4	0,836	Handal
3.	Kapasitas Aparatur Gampong (X ₂)	5	0,813	Handal
4.	Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X ₃)	3	0,859	Handal

Sumber : data diolah 2022

Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach Alpha, nilai *cronbach alpha reliabilitas* yang baik adalah yang makin mendekati 1, Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpha* 0,80 atau diatasnya adalah baik. Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel keputusan pembelian berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.4. Hasil Penelitian

4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor Partisipasi Masyarakat (X_1), Kapasitas Aparatur Gampong (X_2) dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,384	,267		1,438	,155
Partisipasi Masyarakat (X_1)	-,202	,092	-,203	-2,195	,014
Kapasitas Aparatur Gampong (X_2)	,397	,095	,381	4,174	,000
Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3)	,464	,102	,546	4,556	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 0,384 - 0,202X_1 + 0,397X_2 + 0,464X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefesien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 0,384 artinya bila mana Partisipasi Masyarakat (X_1), Kapasitas Aparatur Gampong (X_2) dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3), dianggap konstan, maka Kinerja

Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar adalah sebesar 0,384 pada satuan skala likert

- b. Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat (X_1) sebesar -0,202. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel Partisipasi Masyarakat akan menurunkan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar sebesar 20,2% dengan asumsi variabel Kapasitas Aparatur Gampong (X_2) dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) dianggap konstan.
- c. Koefisien regresi Kapasitas Aparatur Gampong (X_2) sebesar 0,397. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel Kapasitas Aparatur Gampong secara relatif akan meningkatkan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar sebesar 39,7% dengan asumsi variabel Partisipasi Masyarakat (X_1), dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) dianggap konstan
- d. Koefisien regresi Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) sebesar 0,464. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara relatif akan meningkatkan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. sebesar 46,4% dengan asumsi variabel Partisipasi Masyarakat (X_1) dan Kapasitas Aparatur Gampong (X_2), dianggap konstan.

4.4.2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain.

Tabel 4.9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,854 ^a	0,729	0,716	,40421

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X3), Kapasitas Aparatur Gampong (X2), Partisipasi Masyarakat (X1)

Berdasarkan dari output komputer diatas maka diperoleh koefisien korelasi (R) dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,854 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 85,4%. Artinya faktor Partisipasi Masyarakat (X_1), Kapasitas Aparatur Gampong (X_2), dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

Sementara itu koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,729 artinya bahwa sebesar 72,9% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan Partisipasi Masyarakat (X_1), Kapasitas Aparatur Gampong (X_2) dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3).

Sedangkan selebihnya sebesar 27,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan di atas seperti kemampuan SDM, pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi.

4.4.3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama maupun secara parsial terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

4.4.3.1. Pengujian Secara Bersama-Sama

$H_1 : \beta_1 = -0,202, \beta_2 = 0,397, \beta_3 = 0,464$, maka $\beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0, \beta_3 \neq 0$, : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

4.4.3.2. Pengujian Secara Parsial

$H_2 : H_1 : \beta_1 = -0,202, \beta_1 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

$H_3 : H_2 : \beta_2 = 0,397, \beta_2 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya Kapasitas Aparatur

Gampong secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

$H_3 : H_3 : \beta_3 = 0,464, \beta_3 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Pengujian secara bersama-sama dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong bersama terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Ningsih (2020) karena variabel yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong yaitu Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong.

4.5.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Partisipasi Masyarakat adalah sebesar -0,202 yang berarti Partisipasi Masyarakat mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_1 sebesar -0,202 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hal ini sejalan dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Ningsih (2020) dan Tumbel (2020) serta Firdaus (2019) karena variabel yang diteliti yaitu Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

Pengelolaan ADG dilaksanakan secara partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif didalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Singkatnya, partisipasi masyarakat menjadi titik strategis dalam pengelolaan ADG. Partisipasi masyarakat pada dasarnya berperan penting didalam menciptakan keadaan yang lebih adil, partisipatif, dan akuntabel juga merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pada level pemerintahan gampong. Suwandi (2015), menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah gampong cukup tinggi, namun dalam pengelolaannya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum terjadi secara langsung.

4.5.3. Pengaruh Kapasitas Aparatur Gampong Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Kapasitas Aparatur Gampong adalah sebesar 0,397 yang berarti Kapasitas Aparatur Gampong mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_2 sebesar 0,397 dengan hasil perhitungan $\beta_2 \neq 0$, dapat disimpulkan Kapasitas Aparatur Gampong secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Ningsih (2020) karena variabel yang diteliti akuntabilitas sama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

Aparatur merupakan salah satu faktor terpenting sebagai penunjang pemerintah. Tugas utama dari aparatur adalah sebagai pelayanan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan. Tanpa adanya aparatur, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan. Mengingat begitu pentingnya peran aparatur maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparatur itu sendiri baik melalui pengembangan aparatur dengan pelatihan maupun dengan berbagai hal lainnya.

4.5.4. Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong adalah sebesar 0,464 yang berarti Pengawasan Badan

Permasyarakatan Gampong mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_3 sebesar 0,464 dengan hasil perhitungan $\beta_3 \neq 0$, dapat disimpulkan Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Ningsih (2020) karena variabel yang diteliti Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong sama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

Peran BPG dalam pengelolaan dana gampong antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana gampong sebagai wujud penampungan aspirasi masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana gampong dengan pertimbangan kepala gampong. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelola dana gampong dilakukan BPG secara langsung dan berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama kepala dan perangkat gampong, serta kelompok masyarakat dari awal sampai selesai. BPG juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPG yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja gampong kepada kepala gampong selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong. BPG wajib menyampaikan laporan karena BPG juga menggunakan dana dari APBG. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas BPG juga membuat laporan penggunaan keuangannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.
2. Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar
3. Kapasitas Aparatur Gampong secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.
4. Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada kecamatan Sukamakmur Aceh Besar sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat kecamatan Sukamakmur Aceh Besar dapat berpartisipasi terhadap pembangunan gampong serta selalu ikut sertakan ketika aparaturnya mengadakan rapat gampong.

2. Disarankan aparaturnya gampong kecamatan Sukamakmur Aceh Besar dapat meningkatkan motivasi diri dan meningkatkan pengetahuan agar kapasitas aparaturnya gampong dapat mengelola dana desa dengan baik
3. Disarankan Badan Permusyawaratan Gampong di kecamatan Sukamakmur Aceh Besar dapat meningkatkan pencapaian target pengelolaan alokasi dana desa dan mengawasi aparaturnya yang melakukan kecurangan.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak berfokus kepada variabel partisipasi masyarakat, kapasitas aparaturnya gampong dan pengawasan badan permusyawaratan gampong saja, tapi juga meneliti variabel lainnya seperti pengendalian intern, sumber daya manusia dan sistem akuntansi gampong.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aulia, Putri. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-15
- Bharoto, M. H. (2017) Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon. *Artikel Manajemen*
- Fahmi, Irham (2018) *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi Dan Kasus*. Alfabeta, Bandung.
- Gary, D., (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi Kesepuluh jilid Satu. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Goodhue, D L (2018) *Understanding User Evaluation Of Information System*, Management Science. Desember, 1827-1844
- Hair, Joseph F. Jr. et al. (2018). *Multivariate Data Analysis*. Pearson. Education Limited. Harlow. England.
- Halim dan Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M.S.P., (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Irmawati, W., (2016). *Pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Jenderal Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana
- Jumali, M.dkk. (2017). *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta Salemba Empat
- Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2018). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Rafika Aditama
- Marschall B. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Alihbahasa : Kikin Sakinah
- Mulyadi. (2018). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Murhaini, Suriansyah (2016) *Manajemen Pengawasan Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Perdana, Khaeril. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-11
- Rachman, A. A. (2016). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*,. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Santoso, Singgih. (2016). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Slamet, M. (2018). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Soeprapto Riyadi. (2017). *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, World Bank.
- Sugiyono. (2018). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suhud, Sheilla Putri (2018) *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pegawai Distro Di Kota Bandung*. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Sunyoto. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku.
- Supomo dan Indriantoro, Nur (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta.
- Suryawan, I. K. (2018) Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual dengan Insentif Sebagai Variabel Pemoderasi Pada LPD. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.23. No, 2.
- Sutrisno , Edy. (2016) *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Suwatno. & Priansa, D. (2016). *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwatno., (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, Kencana (2016) *Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta*, Jawa Barat
- Syahrani (2016). Analisis Kinerja Aparatur Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Nunukan. *Journal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1624-163
- Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kuisisioner

Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah untuk mendapatkan data bagi penulis skripsi pada fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya sangat menghargai bantuan saudara-saudari yang telah menjawab semua pertanyaan dengan kondisi yang berlaku pada saudara-saudari sendiri. Berilah tanda (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

A. indentitas responden**1. Umur**

- a. 20-25 Tahun ☐
- b. 26-31 Tahun ☐
- c. 32-37 Tahun ☐
- d. 38-43 Tahun ☐
- e. 44-49 Tahun ☐
- f. ≥ 50 Tahun ☐

2. Jenis kelamin

- a. Pria ☐
- b. Wanita ☐

3. Status perkawinan

- a. Belum menikah ☐
- b. Menikah ☐

4. Tingkat Pendidikan

- a. SLTA ☐
- b. Diploma III ☐
- c. Sarjana (S1) ☐
- d. Pasca Sarjana (S2) ☐
- e. Doktor (S3) ☐

5. Penghasilan perbulan

- a. < Rp 2.500.000 ☐
- b. Rp. 2.600.000 - Rp. 4.000.000 ☐
- c. Rp. 4.100.000 - Rp. 5.500.000 ☐
- d. $\geq$ Rp. 5.500.000 ☐

B. Indikator Variabel

Ket : 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

1. Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Menggunakan sistem komputer pada kantor dapat meningkatkan kualitas kerja					
2	Saya selalu berusaha memahami data dan informasi yang menjadi tanggung jawab saya					
3	Aktivitas yang umum dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi					
4	Saya yakin dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif					
5	Sistem komputer yang saya manfaatkan sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja saya					
6	Setelah menggunakan sistem komputer saya merasa lebih produktif					

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X₁)

No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa					
2	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi pengelolaan dana desa					
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa					
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur					

3. Variabel Kapasitas Aparatur Gampong (X₂)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Aparatur gampong memperoleh kehormatan sebagai aparatur yang layak diterima masyarakat					
2	Aparatur memiliki sifat kerja yang baik dalam pengelolaan dana desa					
3	Keberhasilan yang aparatur capai merupakan hasil dari kegigihan aparatur bekerja sebagai konsep dirinya					
4	Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur sudah baik					
5	Aparatur gampong memiliki keterampilan kerja yang baik					

4. Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X₃)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur, prestasi dan pencapaian sasaran					
2	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat berkurangnya penyalahgunaan wewenang					
3	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat mengurangi tingkat pemborosan dan pungutan liar					

Lampiran 2 Data Dari Jawaban Kuesioner

[illegible]

51	5	1	2	3	1	4	4	5	4	3	3	3,8	4	4	3	3	3,5	5	5	5	4	4	4,6	4	4	5	4,3
52	2	1	2	3	3	3	4	5	5	5	5	4,5	5	4	5	5	4,8	4	4	4	3	4	3,8	4	5	5	4,7
53	2	1	2	3	2	4	4	4	4	3	3	3,7	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,6	3	4	4	3,7
54	3	1	2	3	2	4	4	4	5	4	4	4,2	5	3	3	4	3,8	3	3	3	4	4	3,4	4	4	4	4
55	2	1	2	3	4	4	3	4	4	4	4	3,8	3	3	4	4	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	1	2	3	2	5	5	4	4	4	4	4,3	5	5	5	4	4,8	5	4	4	4	4	4,2	4	4	5	4,3
57	6	1	2	3	2	4	3	4	4	4	4	3,8	3	3	4	3	3,3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
58	4	1	2	2	3	3	4	2	4	2	4	3,2	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3,2	4	4	4	4
59	4	2	2	2	2	2	3	4	3	4	3	3,2	3	1	1	3	2	5	3	3	3	3	3,4	3	3	5	3,7
60	4	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3,8	5	4	4	3	4	5	3	3	3	3	3,4	5	3	3	3,7
61	5	1	2	1	2	5	4	4	5	2	5	4,2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62	3	1	2	3	2	4	3	4	3	4	3	3,5	3	4	4	4	3,8	4	4	4	3	3	3,6	4	3	4	3,7
63	4	1	2	2	2	4	5	5	4	3	4	4,2	4	4	4	5	4,3	5	5	4	4	5	4,6	4	4	4	4
64	3	1	2	1	2	4	5	4	4	2	4	3,8	4	5	4	4	4,3	5	5	5	4	4	4,6	5	4	4	4,3
65	5	1	2	1	2	5	4	4	5	5	5	4,7	4	5	4	5	4,5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
66	5	1	2	1	3	4	4	5	3	3	4	3,8	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	4,8	4	4	4	4
67	3	1	2	1	4	3	4	3	4	4	4	3,7	4	3	3	4	3,5	4	3	3	3	3	3,2	4	4	4	4
68	4	1	2	1	2	3	5	4	5	5	4	4,3	4	4	5	4	4,3	4	4	4	3	3	3,6	4	4	3	3,7
69	4	1	2	1	2	4	4	3	4	2	4	3,5	4	4	3	3	3,5	4	4	4	4	3	3,8	3	4	4	3,7
70	5	1	2	1	2	4	3	3	3	4	4	3,5	4	5	4	2	3,8	4	4	3	3	3	3,4	4	4	4	4

Lampiran 3 Identitas Responden

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 tahun	2	2,9	2,9	2,9
	26-31 tahun	14	20,0	20,0	22,9
	32-37 tahun	11	15,7	15,7	38,6
	38-43 tahun	14	20,0	20,0	58,6
	44-49 tahun	18	25,7	25,7	84,3
	> 50 tahun	11	15,7	15,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	63	90,0	90,0	90,0
	Wanita	7	10,0	10,0	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Status Perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menikah	3	4,3	4,3	4,3
	Menikah	67	95,7	95,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	28	40,0	40,0	40,0
	Diploma	12	17,1	17,1	57,1
	Sarjana	29	41,4	41,4	98,6
	Pasca Sarjana	1	1,4	1,4	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Penghasilan Perbulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 2.500.000	14	20,0	20,0	20,0
	Rp. 2.600.000 - Rp. 4.000.000	33	47,1	47,1	67,1
	Rp. 4.100.000 - Rp. 5.500.000	17	24,3	24,3	91,4
	>Rp. 5.500.000	6	8,6	8,6	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Lampiran 4 Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Gampong (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,4	1,4	1,4
	TS	8	11,4	11,4	12,9
	KS	20	28,6	28,6	41,4
	S	30	42,9	42,9	84,3
	SS	11	15,7	15,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	4,3	4,3	4,3
	TS	3	4,3	4,3	8,6
	KS	14	20,0	20,0	28,6
	S	32	45,7	45,7	74,3
	SS	18	25,7	25,7	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	5,7	5,7	5,7
	TS	7	10,0	10,0	15,7
	KS	11	15,7	15,7	31,4
	S	32	45,7	45,7	77,1
	SS	16	22,9	22,9	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	4,3	4,3	4,3
	TS	1	1,4	1,4	5,7
	KS	10	14,3	14,3	20,0
	S	42	60,0	60,0	80,0
	SS	14	20,0	20,0	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	7,1	7,1	7,1

TS	17	24,3	24,3	31,4
KS	12	17,1	17,1	48,6
S	24	34,3	34,3	82,9
SS	12	17,1	17,1	100,0
Total	70	100,0	100,0	

A6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	3	4,3	4,3	4,3
TS	1	1,4	1,4	5,7
KS	14	20,0	20,0	25,7
S	38	54,3	54,3	80,0
SS	14	20,0	20,0	100,0
Total	70	100,0	100,0	

Lampiran 5 Persentase Partisipasi Masyarakat (X_1)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	5,7	5,7	5,7
	TS	3	4,3	4,3	10,0
	KS	12	17,1	17,1	27,1
	S	36	51,4	51,4	78,6
	SS	15	21,4	21,4	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	7	10,0	10,0	10,0
	TS	3	4,3	4,3	14,3
	KS	12	17,1	17,1	31,4
	S	35	50,0	50,0	81,4
	SS	13	18,6	18,6	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	5,7	5,7	5,7
	TS	6	8,6	8,6	14,3
	KS	12	17,1	17,1	31,4
	S	35	50,0	50,0	81,4
	SS	13	18,6	18,6	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,9	2,9	2,9
	TS	4	5,7	5,7	8,6
	KS	16	22,9	22,9	31,4
	S	34	48,6	48,6	80,0
	SS	14	20,0	20,0	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Lampiran 6 Persentase Kapasitas Aparatur Gampong (X₂)

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	5,7	5,7	5,7
	TS	2	2,9	2,9	8,6
	KS	8	11,4	11,4	20,0
	S	28	40,0	40,0	60,0
	SS	28	40,0	40,0	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	4,3	4,3	4,3
	TS	5	7,1	7,1	11,4
	KS	12	17,1	17,1	28,6
	S	34	48,6	48,6	77,1
	SS	16	22,9	22,9	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,9	2,9	2,9
	TS	4	5,7	5,7	8,6
	KS	18	25,7	25,7	34,3
	S	32	45,7	45,7	80,0
	SS	14	20,0	20,0	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,9	2,9	2,9
	TS	3	4,3	4,3	7,1
	KS	20	28,6	28,6	35,7
	S	35	50,0	50,0	85,7
	SS	10	14,3	14,3	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,4	1,4	1,4
	TS	2	2,9	2,9	4,3
	KS	18	25,7	25,7	30,0
	S	30	42,9	42,9	72,9
	SS	19	27,1	27,1	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Lampiran 7 Persentase Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X₃)

D1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	5,7	5,7	5,7
	TS	1	1,4	1,4	7,1
	KS	8	11,4	11,4	18,6
	S	43	61,4	61,4	80,0
	SS	14	20,0	20,0	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

D2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	7,1	7,1	7,1
	TS	3	4,3	4,3	11,4
	KS	8	11,4	11,4	22,9
	S	37	52,9	52,9	75,7
	SS	17	24,3	24,3	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

D3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	4,3	4,3	4,3
	TS	4	5,7	5,7	10,0
	KS	9	12,9	12,9	22,9
	S	35	50,0	50,0	72,9
	SS	19	27,1	27,1	100,0
	Total	70	100,0	100,0	

Lampiran 8 Reliability & Validitas Kinerja Pengelolaan Dana Gampong (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,841	,851	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,60	,939	70
A2	3,84	1,002	70
A3	3,70	1,108	70
A4	3,90	,887	70
A5	3,30	1,220	70
A6	3,84	,911	70

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	18,59	15,551	,585	,484	,821
A2	18,34	14,895	,629	,568	,812
A3	18,49	13,500	,741	,599	,788
A4	18,29	14,845	,751	,685	,793
A5	18,89	15,407	,404	,371	,866
A6	18,34	15,069	,688	,596	,803

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22,19	20,762	4,557	6

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	238,764	69	3,460		

Within People	Between Items	17,555	5	3,511	6,366	,000
	Residual	190,279	345	,552		
	Total	207,833	350	,594		
Total		446,598	419	1,066		

Grand Mean = 3,70

Lampiran 9 Reliability & Validitas Partisipasi Masyarakat (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,836	,836	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3,79	1,020	70
B2	3,63	1,144	70
B3	3,67	1,059	70
B4	3,77	,935	70

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	11,07	7,169	,632	,443	,808
B2	11,23	6,121	,747	,638	,756
B3	11,19	6,704	,699	,596	,779
B4	11,09	7,674	,601	,392	,821

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14,86	11,660	3,415	4

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	201,143	69	2,915		
Within People					
Between Items	1,229	3	,410	,858	,464
Residual	98,771	207	,477		
Total	100,000	210	,476		

Total	301,143	279	1,079		
-------	---------	-----	-------	--	--

Grand Mean = 3,71

Lampiran 10 Reliability & Validitas P Kapasitas Aparatur Gampong (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,813	,813	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	4,06	1,075	70
C2	3,79	1,020	70
C3	3,74	,943	70
C4	3,69	,877	70
C5	3,91	,880	70

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	15,13	8,288	,616	,509	,774
C2	15,40	8,186	,690	,523	,749
C3	15,44	8,540	,694	,592	,749
C4	15,50	9,268	,602	,514	,778
C5	15,27	10,114	,423	,396	,825

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,19	13,255	3,641	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	182,917	69	2,651		

Within People	Between Items	6,217	4	1,554	3,141	,015
	Residual	136,583	276	,495		
	Total	142,800	280	,510		
Total		325,717	349	,933		

Grand Mean = 3,84

Lampiran 11 Reliability & Validitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,859	,858	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3,89	,941	70
D2	3,83	1,076	70
D3	3,90	1,009	70

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	7,73	3,853	,658	,466	,870
D2	7,79	2,953	,826	,689	,711
D3	7,71	3,424	,729	,596	,806

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11,61	7,168	2,677	3

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	164,862	69	2,389		
Within People					
Between Items	,200	2	,100	,297	,744
Residual	46,467	138	,337		
Total	46,667	140	,333		
Total	211,529	209	1,012		

Grand Mean = 3,87

Lampiran 12 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong (X3), Kapasitas Aparatur Gampong (X2), Partisipasi Masyarakat (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Dana Gampong (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,854 ^a	,729	,716	,40421

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong (X3), Kapasitas Aparatur Gampong (X2), Partisipasi Masyarakat (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28,967	3	9,656	59,098	,000 ^b
	Residual	10,783	66	,163		
	Total	39,751	69			

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Dana Gampong (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong (X3), Kapasitas Aparatur Gampong (X2), Partisipasi Masyarakat (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,384	,267		1,438	,155
	Partisipasi Masyarakat (X1)	-,202	,092	-,203	-2,195	,014
	Kapasitas Aparatur Gampong (X2)	,397	,095	,381	4,174	,000

	Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X3)	,464	,102	,546	4,556	,000
--	---	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Dana Gampong (Y)

Lampiran 13

Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95 %

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	95	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel